

# **LAPORAN MANAJERIAL TRIWULAN I**

## **SATKER BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Manajerial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 pada BAB III Pasal 23 ayat (1a) mengamanatkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan manajerial.

Laporan Manajerial Triwulan I tahun 2022 ini berisikan capaian perjanjian kinerja serta perkembangan realisasi dan penyerapan anggaran yang disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Perencanaan melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi yang diberikan oleh Kementerian Bappenas pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022.

Akhir kata, semoga laporan manajerial yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja (Satker) Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan kondisi Triwulan I Tahun 2022. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Padang, April 2022

KEUSAHA PENGUNA ANGGARAN  
SATKER BAPPEDA PROV. SUMBAR



**Medi Iswandi, ST, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750502 199903 1 004

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	2
1.4 Informasi Anggaran .....	3
1.5 Struktur Organisasi Tim Satker .....	3
1.6 Keluaran yang diharapkan.....	4
 <b>BAB II    RENCANA PELAKSANAAN .....</b>	 <b>5</b>
2.1 Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran .....	5
2.2 Penetapan Kinerja .....	6
2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	7
 <b>BAB III    HASIL PELAKSANAAN .....</b>	 <b>9</b>
3.1 Realisasi Penyerapan Anggaran .....	9
3.2 Realisasi Kegiatan .....	10
3.3 Capaian Indikator Kinerja .....	21
3.4 Kendala yang dihadapi .....	22
 <b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	 <b>23</b>
4.1 Kesimpulan .....	23
4.2 Rekomendasi .....	23

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.5.1 Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Bappeda Prov. Sumbar Tahun Anggaran 2022 .....	3
Tabel 1.6.1 Output Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2022 .....	4
Tabel 2.1.1 Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2022 .....	5
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	6
Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2022 .....	7
Tabel 3.1.1 Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 .....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah memiliki harapan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan manajemen yang efektif dan efisien baik dalam tahapan proses perencanaan, maupun penganggaran. Integrasi perencanaan dan penganggaran telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 sebagai upaya menyelesaikan masalah ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

Sinergi pusat dan daerah yang didukung dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Sinergi dan keterpaduan perlu didukung dengan penyelenggaraan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sinergi perencanaan pusat dan daerah dibutuhkan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyelenggara tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional serta menyelenggarakan fungsi yang mencakup antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional juga ditugaskan dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data Indonesia serta berperan sebagai clearing house perencanaan pembangunan.

Dalam kaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut serta peningkatan kualitas dari perencanaan nasional, dibutuhkan adanya penguatan koordinasi antar lembaga perencanaan yaitu antara Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pusat dengan Bappeda sebagai lembaga perencanaan di daerah. Melalui Dekonsentrasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga perencanaan pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini juga diarahkan untuk (i) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) memperkuat koordinasi kebijakan tata kelola data pembangunan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan (iii) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Musrenbang. Dengan demikian diharapkan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada Tahun 2022, Provinsi Sumatera Barat memperoleh Dana Dekonsentrasi BAPPENAS melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 967.604.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah) yang dikelola oleh Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi, maka perlu disusun Laporan Manajerial yang memuat informasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas di daerah. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 pada Bab III Pasal 23 disebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Manajerial, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Laporan Manajerial yang memuat informasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas di daerah.

## 1.2 Tujuan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 pada Bab II Pasal 2 bahwa tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta menguatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Fasilitasi Pembinaan Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional, dengan substansi kegiatan antara lain :
  - a. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat
  - b. Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat
  - c. Rapat Koordinasi Persiapan, Mengikuti dan Menghadiri Temu Pusat dan Daerah, Rakorgub, Rakorteknas, Pramusrenbangnas dan Musrenbangnas.
  - d. Sosialisasi Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024, dan Rancangan Awal RKP 2023.

- e. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pendampingan Penerjemahan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat.
  - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro Regional Wilayah Sumatera.
2. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi

#### 1.4 Informasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2022 tanggal 17 November 2021, alokasi anggaran dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 yang diamanahkan kepada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 967.604.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah).

#### 1.5 Struktur Organisasi Tim Satker

Pejabat Pengelola Keuangan Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 902-8-2022 Tentang Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pengelola SAI Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 1.5.1**  
**Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Bappeda Prov. Sumbar**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Nama	Jabatan	Pelaksana Jabatan
1	Medi Iswandi, ST, MM.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bappeda
2	Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris
3	Benny Ricardo, SE.	Pejabat Penguji Tagihan/Pendatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Substansi Program
4	Harini, SE.	Bendahara Pengeluaran	Staf
5	Hera Kurniawati, SE.	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Penanggung Jawab)	Kasubag Keuangan
6	Nenen Delfira	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Koordinator)	Staf
7	Defridawati	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Ketua)	Staf
8	Feri Rinaldi Z, ST, ME.	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Anggota)	Staf

### 1.6 Keluaran yang diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6.1**  
**Output Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Capaian Output
1	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat
2	Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat	Terpilihnya kabupaten/kota yang berprestasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD Tahun 2022
3	Rapat Koordinasi Persiapan, Mengikuti dan Menghadiri Temu Pusat dan Daerah, Rakorgub, Rakorteknas, Pramusrenbangnas dan Musrenbangnas	Terlaksananya rapat koordinasi dan pembahasan internal dan lintas OPD dan Kab/kota dalam menyusun bahan perencanaan pembangunan dan keikutsertaan dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, regional dan teknis daerah
4	Sosialisasi Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024, dan Rancangan Awal RKP 2023	Bertambahnya pemahaman aparatur dalam memahami Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024, dan Rancangan Awal RKP 2023 dalam menyusun dokumen perencanaan
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pendampingan Penerjemahan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya pemahaman SDM Perencanaan Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam Penyusunan Perencanaan dan Pendampingan Penerjemahan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro Regional Wilayah Sumatera	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Makro Regional Wilayah Sumatera
7	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat



## BAB II

### RENCANA PELAKSANAAN

#### 2.1 Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2022 tanggal 17 November 2021, rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi**  
**Tahun 2022**

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Semula (Rp.)
<b>01.06</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Nasional</b>	<b>958.891.000</b>
<b>5246</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang</b>	
<b>I</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional</b>	<b>728.972.000</b>
a.	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat	101.629.750
521211	Belanja Bahan	29.149.750
524111	Belanja Perjalanan Dinas	72.480.000
b.	Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat	190.194.000
521211	Belanja Bahan	71.550.000
521213	Belanja Output Kegiatan	9.300.000
522151	Belanja Jasa Profesi	22.400.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	69.864.000
524111	Lembur	11.494.000
c.	Rapat Koordinasi Persiapan, Mengikuti dan Menghadiri Temu Pusat dan Daerah, Rakorgub, Rakorteknas, Pramusrenbangnas dan Musrenbangnas	70.172.000
521211	Belanja Bahan	21.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi	20.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	27.872.000
d.	Sosialisasi Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024, dan Rancangan Awal RKP 2023	2.780.000
521211	Belanja Bahan	2.780.000
e.	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pendampingan Penerjemahan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat	194.316.250
521211	Belanja Bahan	13.242.250
522151	Belanja Jasa Profesi	25.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	59.760.000
521213	Honor Output Kegiatan	4.850.000
524114	Biaya Paket Meeting Luar Kota	91.264.000

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Semula (Rp.)
f.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro Regional Wilayah Sumatera	169.880.000
521211	Belanja Bahan	3.310.000
521213	Honor Output Kegiatan	6.350.000
522151	Belanja Jasa Profesi	36.600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	23.070.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.200.000
<b>II</b>	<b>Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi</b>	<b>229.919.000</b>
521115	Honor Output Kegiatan	57.960.000
521211	Belanja Bahan	53.403.000
521119	Belanja Operasional Lainnya	14.500.000
524111	Lembur	19.232.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	84.824.000

## 2.2 Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya sinergi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah	1. % kesesuaian kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi 2021 sesuai rencana	100%
		2. Kesesuaian muatan RKPD Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2021	Baik
		3. Kesesuaian KEM Daerah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) dengan KEM Nasional	80%
		4. Ketepatan waktu pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Daerah	100%

### Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang

### Anggaran

Rp. 958.891.000,-

### 2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2022**

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat	Januari	Pemantauan ke Kab/Kota Penilaian PPD
2	Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat	Januari - Maret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honor narasumber</li> <li>• Honor moderator</li> <li>• Perjalanan dinas</li> <li>• Biaya Makan Minum</li> <li>• ATK</li> <li>• Penggandaan</li> <li>• Lembur</li> </ul>
3	Rapat Koordinasi Persiapan, Mengikuti dan Menghadiri Temu Pusat dan Daerah, Rakorgub, Rakorteknas, Pramusrenbangnas dan Musrenbangnas	Maret - Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honor narasumber</li> <li>• Honor moderator</li> <li>• Perjalanan dinas</li> <li>• Biaya Makan Minum</li> <li>• ATK</li> <li>• Penggandaan</li> </ul>
4	Sosialisasi Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024, dan Rancangan Awal RKP 2023	Minggu ke-1 Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber (Bappenas : 2 orang)</li> <li>• Moderator 2 org</li> <li>• Peserta 100 org (OPD Provinsi, Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat)</li> <li>• Waktu pelaksanaan 1 hari</li> <li>• Tempat : Kantor masing-masing secara virtual meeting</li> </ul>
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pendampingan Penerjemahan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat	Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber (Bappenas : 2 orang, Mendagri : 2 hari)</li> <li>• Moderator 4 orang</li> <li>• Peserta 170 orang (OPD Provinsi : Sekretaris dan Kasubbag Program dan Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat : Sekretariat dan Penyusun Perencanaan)</li> </ul>

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu pelaksanaan 2 hari</li> <li>• Tempat : Bukittinggi</li> </ul>
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro Regional Wilayah Sumatera	Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber (Bappenas, Bank Indonesia, BPS, Mendagri)</li> <li>• Moderator 4 orang</li> <li>• Peserta 200 orang</li> <li>• Waktu pelaksanaan 2 hari</li> <li>• Tempat : Padang</li> </ul>
7	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	Januari - Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honor</li> <li>• Biaya makan minum</li> <li>• Perjalanan dinas</li> <li>• Penggandaan</li> <li>• ATK</li> <li>• Administrasi Umum</li> </ul>

## BAB III

### HASIL PELAKSANAAN

#### 3.1 Realisasi Penyerapan Anggaran

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, sampai dengan triwulan I Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 kegiatan yaitu 1) Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat; 2) Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat. Potret serapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2022 masih sebesar 10,41% atau sebesar Rp. 99.864.730,- dari total anggaran sebesar Rp. 958.891.000,-. Serapan anggaran berdasarkan masing-masing jenis belanja yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi**  
**Triwulan I Tahun 2022**

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
<b>01.06</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Nasional</b>	<b>958.891.000</b>	<b>99.864.730</b>	<b>10,41</b>	<b>859.026.270</b>
<b>5246</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang</b>				
<b>I</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional</b>	<b>728.972.000</b>	<b>90.729.230</b>	<b>12,45</b>	<b>638.242.770</b>
a.	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat	101.629.750	-	-	101.629.750
521211	Belanja Bahan	29.149.750	-	-	29.149.750
524111	Belanja Perjalanan Dinas	72.480.000	-	-	72.480.000
b.	Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat	190.194.000	90.729.230	47,70	99.464.770
521211	Belanja Bahan	71.550.000	24.308.230	33,97	47.241.770
521213	Belanja Output Kegiatan	9.300.000	-	-	9.300.000
522151	Belanja Jasa Profesi	22.400.000	22.400.000	100	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	69.864.000	44.021.000	63,01	25.843.000
524111	Lembur	11.494.000	-	-	11.494.000
c.	Rapat Koordinasi Persiapan, Mengikuti dan Menghadiri Temu Pusat dan Daerah, Rakorgub,	70.172.000	-	-	70.172.000

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
	Rakorteknas, Pramusrenbangnas dan Musrenbangnas				
521211	Belanja Bahan	21.500.000	-	-	21.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi	20.800.000	-	-	20.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	27.872.000	-	-	27.872.000
d.	Sosialisasi Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024, dan Rancangan Awal RKP 2023	2.780.000	-	-	2.780.000
521211	Belanja Bahan	2.780.000	-	-	2.780.000
e.	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pendampingan Penerjemahan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat	194.316.250	-	-	194.316.250
521211	Belanja Bahan	13.242.250	-	-	13.242.250
522151	Belanja Jasa Profesi	25.200.000	-	-	25.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	59.760.000	-	-	59.760.000
521213	Honor Output Kegiatan	4.850.000	-	-	4.850.000
524114	Biaya Paket Meeting Luar Kota	91.264.000	-	-	91.264.000
f.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro Regional Wilayah Sumatera	169.880.000	-	-	169.880.000
521211	Belanja Bahan	3.310.000	-	-	3.310.000
521213	Honor Output Kegiatan	6.350.000	-	-	6.350.000
522151	Belanja Jasa Profesi	36.600.000	-	-	36.600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	23.070.000	-	-	23.070.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.200.000	-	-	99.200.000
<b>II</b>	<b>Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi</b>	<b>229.919.000</b>	<b>9.135.500</b>	<b>3,97</b>	<b>220.783.500</b>
521115	Honor Output Kegiatan	57.960.000	5.400.000	9,32	52.560.000
521211	Belanja Bahan	53.403.000	3.735.500	6,99	49.667.500
521119	Belanja Operasional Lainnya	14.500.000	-	-	14.500.000
524111	Lembur	19.232.000	-	-	19.232.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	84.824.000	-	-	84.824.000

### 3.2 Realisasi Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan tentang pencapaian target keluaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DIPA Kegiatan Dekonsentrasi APBN Bappenas Tahun Anggaran 2022 Satker Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (080019) dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2022 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 :

**I. Fasilitasi Pembinaan Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional, yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu :**

**1) Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat**

Tujuan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat adalah :

1. Melihat konsistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah disahkan.
2. Melihat perkembangan pelaksanaan pembangunan di kabupaten kota.
3. Mendampingi Kabupaten Kota dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2023 guna menjaga keselarasan dokumen perencanaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2023 ke Kab Kota se-Sumatera Barat adalah jumlah laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 dan pendampingan penyusunan RKPD 2023 ke kab kota se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 25 Januari 2022 dalam bentuk melakukan pemantauan dan pendampingan ke 13 kabupaten/kota guna melihat kesiapan kabupaten/kota dalam memenuhi kriteria penilaian PPD tahun 2022 dan memberikan masukan untuk penyempurnaan penyusunan RKPD tahun 2023.

**2) Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat**

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dengan pemberian apresiasi pembangunan ini adalah terciptanya keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah. PPD tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 00880/PP.08.01/Dt.9.3./T/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :

1. Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2022

2. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 bagi Kab/Kota
3. Pengumpulan Dokumen
4. Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen) PPD Tahun 2022
5. Penilaian Tahap II (Presentasi dan Wawancara) PPD Tahun 2022 ke Kab/Kota Nominasi
6. Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2022

Berikut uraian masing-masing tahapan yang dilakukan dalam Koordinasi Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi se-Sumatera Barat tahun 2022 :

1. Pembentukan Tim Penilai Independen Daerah, Tim Penilai Utama Daerah dan Tim Penilai Teknis Daerah Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 melalui Keputusan Pengguna Anggaran Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : 050/01-Dekon/I/SK/SET/Bappeda-2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana, Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 secara zoom meeting.

Sosialisasi PPD Tahun 2021 dibuka oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP dengan materi Pelaksanaan PPD Tahun 2022, Tujuan dan Objek, Ruang Lingkup, Perkembangan PPD serta Upaya Peningkatan Kualitas PPD.



Materi Penjelasan umum mengenai pelaksanaan Penilaian PPD Tahun 2022 Tingkat Provinsi disampaikan oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Ibu Agustin Arry Yanna, SS. MA dengan materi yang meliputi Manfaat PPD, Perkembangan PPD, Tahap dan Modul Penilaian Provinsi, Timeline PPD dan Rencana Kerja PPD.

Penjelasan Teknis mengenai pelaksanaan Penilaian PPD Tahun 2022 Tingkat Provinsi disampaikan oleh Koordinator PEPPD Wilayah I dan II Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.



Pada Penilaian PPD Tahun 2022 ini terdapat beberapa pembaharuan, diantaranya :

- 1) Penguatan Sistem Penilaian menggunakan aplikasi web-based (Digital Evaluation System).
- 2) Penambahan item penilaian terkait pencapaian untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
- 3) Penguatan informasi daerah melalui perluasan sistem yang mengakses informasi kabupaten/kota.
- 4) Menambahkan unsur leadership dalam proses penilaian, yaitu pada tahap presentasi dan wawancara.

Penilaian PPD terhadap Kabupaten Kota oleh Provinsi terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu :

- 1) Tahapan pertama adalah penilaian Dokumen RKPD dan inovasi dengan bobot 45 %. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT).
- 2) Tahapan kedua adalah Verifikasi dan Wawancara dengan bobot 55 %. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama.

### 3. Pengumpulan Dokumen

Pada tahapan ini, dokumen PPD yang dikumpulkan antara lain :

- 1) Dokumen RKPD Tahun 2022 yang telah disahkan, Dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah disahkan (Murni dan Perubahan) dan Dokumen RKPD Tahun 2020 yang telah disahkan (Murni dan Perubahan).
- 2) Dokumen RPJMD yang masih berlaku dan telah disahkan.
- 3) Dokumen inovasi daerah
- 4) Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah
- 5) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau yang mewakili yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik serta panitia dapat mempergunakan informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 4. Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen)

Penilaian Tahap I adalah penilaian dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari pencapaian, keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan inovasi. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Penilai Teknis yang berasal dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penilaian dokumen, Tim Penilai Provinsi menetapkan kabupaten dan kota nominasi untuk mengikuti penilaian tahap II. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

Penilaian tahap I telah dilaksanakan secara teknis untuk menilai dokumen RKPD 19 Kab/Kota dan dokumen inovasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Teknis pada tanggal 27 Januari s.d 2 Februari 2022 dengan menetapkan 9 kab/kota sebagai nominasi yang selanjutnya akan diikuti penilaian tahap II.

Terhadap hasil penilaian Tahap I, Tim Penilai Independen yang berasal dari Perguruan Tinggi memberikan masukan agar hasil penilaian terhadap kabupaten/kota yang masuk nominasi dikelompokkan kembali berdasarkan point bobot penilaian tertinggi untuk menguji apakah kabupaten/kota yang masuk nominasi tersebut memperoleh nilai tertinggi pada point tersebut. Hal ini

dilakukan untuk memastikan kalayakan kabupaten/kota tersebut masuk sebagai nominasi pada penilaian tahap I.

Hasil Penilaian Tahap I pada PPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Hasil Penilaian Tahap I	
Kabupaten Nominasi	Kota Nominasi
1. Kabupaten Pasaman	1. Kota Payakumbuh
2. Kabupaten Tanah Datar	2. Kota Padang Panjang
3. Kabupaten Agam	3. Kota Bukittinggi
4. Kabupaten Lima Puluh Kota	
5. Kabupaten Padang Pariaman	
6. Kabupaten Kepulauan Mentawai	

#### 5. Penilaian Tahap II (Penilaian Verifikasi dan Presentasi)

Penilaian Tahap II merupakan pendalaman lebih lanjut dari kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen Daerah (TPID) yang berasal dari unsur perguruan tinggi dan profesional, dan Tim Penilai Utama Daerah (TPUD) terdiri dari unsur Eselon II, Eselon III dan Pejabat Fungsional Perencana (Perencana Madya atau Perencana Utama) yang berasal dari Bappeda dan dinas terkait lainnya. Bobot pada penilaian Tahap II ini adalah sebesar 55 persen.

Penilaian tahap II dilaksanakan tanggal 3 s.d 12 Februari 2022 di 9 kab/kota nominasi oleh Tim Penilai Independen Daerah (TPID) dan Tim Penilai Utama Daerah (TPUD) dalam bentuk presentasi dan wawancara. Aspek yang dinilai dalam tahap ini adalah: (1) Pencapaian, (2) Proses penyusunan dokumen, (3) Kualitas dokumen, dan (4) Inovasi.

Pada PPD Tahun 2022 ini substansi penilaian meliputi Perencanaan, Pencapaian dan Inovasi. Seperti penilaian PPD Tahun 2021, Substansi "Perencanaan" masih menampilkan kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 dan pada substansi "Pencapaian" masih menampilkan pelaporan Transparansi dan Akuntabilitas terkait pelaporan aksi mitigasi penurunan emisi GRK. Sementara itu dari sisi inovasi disesuaikan dengan tema RKP 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan keterbatasan waktu penilaian, maka untuk kabupaten terjauh yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan penilaian secara zoom meeting. Penilaian terhadap kabupaten/kota nominasi yang lain dilakukan melalui kunjungan langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut penilaian tahap II yang dilakukan ke 9 (sembilan) kabupaten/kota nominasi :

##### a. Penilaian ke Kota Bukittinggi

Penilaian PPD Tahap II ke Kota Bukittinggi dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2022 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Walikota Bukittinggi. Tim Penilai dipimpin oleh Ibu Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si sebagai Tim Penilai Utama, sedangkan Pemerintah Kota Bukittinggi dipimpin oleh Walikota Bukittinggi Bapak H. Erman Safar, SH.



Dalam Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi mengangkat tiga isu utama, yaitu Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan. Pada sisi inovasi, Kota Bukittinggi mengangkat inovasi Sistem informasi Rumah Kota Bukittinggi (SIRUBI) yang bertujuan untuk menyediakan data rumah secara terpusat dan berbasis web yang akan dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti verifikasi penerima bantuan, rujukan dalam peningkatan kualitas pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Aplikasi SIRUBI merupakan tools yang menjadi infrastruktur penunjang pelayanan dasar bagi masyarakat dan menjadi support bagi pertumbuhan ekonomi Bukittinggi.

b. Penilaian ke Kota Padang Panjang

Penilaian PPD Tahap II ke Kota Padang Panjang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2022 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Walikota Bukittinggi. Acara dibuka secara resmi oleh Walikota Padang Panjang didampingi oleh Ketua DPRD, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.



Selanjutnya presentasi Walikota Padang Panjang dan pembahasan substansi materi serta wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Penilai Utama yaitu Bapak Medi Iswandi, ST, MM.

Pada PPD Tahun 2022 ini, Kota Padang Panjang menampilkan inovasi Semarak Wisata Kubu Gadang, yaitu wisata berbasis masyarakat yang diinisiasi oleh pemuda dan didukung oleh pemerintah dan tokoh masyarakat. Manfaat inovasi yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar serta terjadinya pemajuan dan pelestarian budaya dimana Kubu Gadang bertransformasi dari kampung biasa menjadi destinasi wisata.

#### c. Penilaian ke Kota Payakumbuh

Penilaian PPD Tahap II ke Kota Payakumbuh dilaksanakan tanggal 05 Februari 2022 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Walikota Payakumbuh. Tim Penilai dimoderatori oleh Kepala Bappeda Sumbar Bapak Medi Iswandi, ST, MM sebagai Tim Penilai Utama sementara Pemerintah Kota Payakumbuh dipimpin oleh Walikota Payakumbuh Bapak Riza Falepi, ST, MT.



Selanjutnya presentasi oleh Walikota Payakumbuh didampingi beberapa Perangkat Daerah Kota Payakumbuh mengenai pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen RKPD. Kota Payakumbuh pada tahun 2022 mengangkat tema RKPD yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan sosial budaya serta reformasi struktural untuk pertumbuhan berkelanjutan, hal ini selaras dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah, serta juga selaras dengan tema RKP tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Pada PPD Tahun 2022 ini, inovasi pembangunan yang diangkat Kota Payakumbuh adalah Sistem Informasi Penataan Ruang (Sitarang). Sitarang merupakan Inovasi Digital dalam bentuk aplikasi berbasis Web bertujuan



untuk menginformasikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan digunakan dalam percepatan proses perizinan.

d. Penilaian ke Kabupaten Padang Pariaman

Penilaian PPD Tahap II ke Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2022 bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Padang Pariaman. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, SE, MM didampingi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD, Asisten, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.



Inovasi yang ditampilkan Kabupaten Padang Pariaman adalah Inovasi Perizinan Langsung Jadi (PADI), dimana perizinan bisa diselesaikan dalam satu hari tanpa biaya dengan syarat perizinan yang sudah lengkap secara administrasi dan sudah ada rekomendasi dari dinas teknis terkait. Tujuan dari inovasi ini adalah agar semakin banyak pengusaha pada skala usaha UMKM untuk menanamkan modal berusaha di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga semakin banyak lapangan usaha yang dibuka di Kabupaten Padang Pariaman kedepannya.

e. Penilaian ke Kabupaten Pasaman

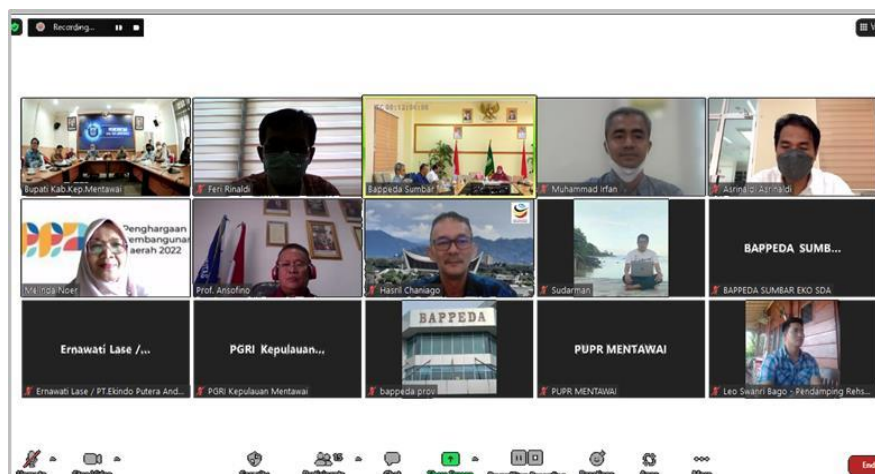
Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahap II ke Kabupaten Pasaman dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Pasaman, Ir. Benny Utama, MM, didampingi oleh Wakil Bupati Pasaman, Ketua DPRD, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.



Pada PPD Tahun 2022 ini, inovasi yang ditampilkan Kabupaten Pasaman adalah Kanmas Man (Kampung Ikan Pasaman). Outcome yang diharapkan dari inovasi ini adalah meningkatnya produksi Perikanan dan jumlah uang beredar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca Covid 19. Inovasi Kang Mas Man mendapat apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti dengan kunjungan Menteri KKP pada tanggal 4 Juni 2021 dan menetapkan Kabupten Pasaman sebagai pilot proyek KKP.

f. Penilaian ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penilaian Tahap II PPD Tahun 2022 untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan secara virtual meeting antara Tim Penilai PPD Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berlokasi di gedung Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin langsung oleh Bupati didampingi Sekretaris Daerah beserta Kepala Perangkat Daerah terkait.



Pada PPD Tahun 2022 ini, inovasi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditampilkan adalah UMA Kreatif, yaitu sebuah platform digital e-commerce yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha khususnya UMKM di Kabupaten kepulauan Mentawai. Para pelaku usaha UMKM sangat terbantu dengan adanya UMA Kreatif ini, sehingga mereka lebih efektif dan efisien dalam memperkenalkan dan memasarkan produk juga memiliki akses pasar

yang tak terbatas. Hingga saat ini sudah terdapat 1981 UMKM yang masuk dan terlibat dalam transaksi pada UMA Kreatif dengan 37 jenis produk yang dipasarkan.

g. Penilaian ke Kabupaten Tanah Datar

Penilaian PPD Tahap II ke Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022 bertempat di Kantor Bupati Tanah Datar. Tim Penilai dipimpin oleh Bapak Medi Iswandi, ST, MM sebagai Tim Penilai Utama, sementara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Wakil Bupati Tanah Datar Bapak Richi Aprian, SH, MH.



Pada PPD Tahun 2022 ini Kabupaten Tanah Datar mengangkat inovasi daerah melalui Gerbang Emas (Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) yang sejalan dengan tema RKP 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Inovasi Gerbang Emas merupakan inovasi yang berasal dari upaya penyelesaian permasalahan ekonomi masyarakat. Inovasi ini melibatkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat dari berbagai sektor

h. Penilaian ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Penilaian PPD Tahap II ke Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota. Tim Penilai dimoderatori oleh Ibu Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si sebagai Tim Penilai Utama, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Bupati Lima Puluh Kota, H. Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, SH.





Inovasi yang ditampilkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah SADARI STUNTING (Satu Data Nagari Stunting) yang bertujuan untuk mewujudkan data stunting yang akurat, mutakhir, terpusat dan terintegrasi.

6. Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-125-2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Kabupaten dan Kota Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan hasil :

Pemenang Tingkat Kota :

Terbaik I : Kota Payakumbuh  
 Terbaik II : Kota Padang Panjang  
 Terbaik III : Kota Bukittinggi

Pemenang Tingkat Kabupaten :

Terbaik I : Kabupaten Pasaman  
 Terbaik II : Kabupaten Tanah Datar  
 Terbaik III : Kabupaten Agam  
 Harapan I : Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Harapan II : Kabupaten Padang Pariaman  
 Harapan III : Kabupaten Kepulauan Mentawai

7. Penyerahan Penghargaan kepada Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret bertepatan dengan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023.



Manfaat yang didapat melalui kegiatan Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah antara lain :

1. Meningkatnya motivasi, komitmen dan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan dengan baik, dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan efektif dan efisien.



2. Lahirnya inovasi-inovasi kreatif dan dinamis dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

### 3.3 Capaian Indikator Kinerja

Pada bagian ini dijelaskan capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan hasil sampai kondisi Triwulan I Tahun 2022 sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya sinergi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah	1. % kesesuaian kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi 2022 sesuai rencana	100%	28,57%
		2. Kesesuaian muatan RKPD Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022	Baik	Baik
		3. Kesesuaian KEM Daerah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) dengan KEM Nasional	80%	100%
		4. Ketepatan waktu pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Daerah	100%	80%

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa sasaran terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah yang diukur melalui 4 (empat) indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja % kesesuaian kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2022 dengan target 100%, terealisasi 28,57%, dimana sampai dengan triwulan I dari 7 kegiatan yang dalam DIPA Tahun 2022 baru bisa dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.
2. Indikator kinerja kesesuaian muatan RKPD Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022 dengan target Baik. Sampai dengan Triwulan I, Provinsi Sumatera Barat pada Penilaian PPD tahun 2022 ini telah lolos ke tahap III, yang artinya pencapaian muatan dokumen yang dinilai pada tahap I sudah dilalui dan dapat dikatakan dengan predikat baik. Hal ini menunjukkan indikator kinerja RKPD sudah sinkron dan selaras dengan RKP 2022, hasil ini didapatkan melalui sinergi dan sinkronisasi terhadap arah kebijakan prioritas pembangunan.
3. Kesesuaian KEM Daerah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) dengan KEM Nasional dengan target 80%, terealisasi 100%.

Indikator Kesesuaian KEM Daerah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) dengan KEM Nasional diukur dengan menghitung jumlah Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) dalam dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan KEM nasional dibandingkan dengan jumlah KEM nasional atau dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah KEM dalam dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan KEM Nasional}}{\text{Jumlah KEM Nasional}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dalam hal ini, KEM Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berjumlah 5 indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Gini telah sesuai dengan KEM Nasional dalam RPJMN yang juga terdiri atas 5 indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Gini, sehingga indikator ini terealisasi 100%.

4. Indikator Ketepatan waktu pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan target 100%, terealisasi 80%. Dalam hal ini, pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri PPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 dilaporkan ke Kementerian PPN/Bappenas sebelum tanggal 10 setiap triwulannya. Namun, untuk kondisi realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2022 baru bisa dilaporkan pada minggu ke-3 April 2022.

### 3.4 Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun 2022 sampai dengan kondisi Triwulan I Tahun 2022 tidak ditemui kendala yang berarti. Sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2021 tanggal 17 November 2021, kegiatan yang diamanatkan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik untuk 2 kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dekonsentrasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kegiatan dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 yang diamanahkan kepada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2022 tanggal 17 November 2022 yang terdiri dari 7 kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
2. Serapan anggaran dekonsentrasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 10,41% atau sebesar Rp. 99.864.730,- dari total anggaran sebesar Rp. 958.891.000,- dengan capaian fisik kegiatan sebesar 28,57%.

### **4.2 Rekomendasi**

Rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi antara lain:

1. Agar tidak terjadi deviasi antara realisasi anggaran dengan capaian fisik masing-masing kegiatan, diharapkan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan bisa diselesaikan tepat waktu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang sudah dilaksanakan untuk penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.